

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budiardjo, Mariam. (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djamal, Faisal. (2009), *Buku Panduan tentang Mekanisme Kerja Anggota dan Parlemen*. Jakarta: Sekretariat Jendral DPR RI.
- Efriza, (2014), *Studi Parlemen*. Malang: Setara Press
- Haris, Syamsuddin. *Partai, pemilu, dan parlemen era reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Moleong, Lexy J. "Moleong." *Metode Penelitian Kualitatif* (2019).
- Muluk, M.R. Khairul. (2007), *Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Pitkin. F. Hanna. (1967), *The Concept of Representation*. University of California Press.
- Pito, Toni Adrianus. Et al. (2006), *mengenal teori-teori Politik*. Bandung: Nuansa.
- Samosir, Osbin. (2021), *Sistem Perwakilan Politik di Era Modern*. Universitas Kristen Indonesia.
- Satrio, J. (2018), *Perwakilan dan Kuasa*. Depok:Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Soeseno, Nuri. (2013), *Representasi Politik*. Jakarta: Puskapol UI.
- Yin. Robert K.(2014), *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta. RajaGrafindo

Jurnal:

Asnawiah, Nurul dan Purwaningsih, Titin. 2020. Analisis Representasi Substantif Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 12 April 2022

Ali Mubina, Fathan. 2020. Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi. Universitas Indonesia. 12 April 2022

Muwahidah, Hanifa. 2019 Representasi Politik Perempuan Partai Demokrat dalam Pemilu

Harirah, Zulfa, dan Mochammad Fatkhurrohman. 2020 "Representasi Politik dalam Fenomena Konflik Goa Pindul di Kabupaten Gunung Kidul." *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Universitas Maritim Raja Ali Haji. 1-21.

Internet:.

DPRD Provinsi DKI Jakarta, Sejarah, <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/sejarah/> diakses pada 29 September 2022.

dukcapil.kemendagri.go.id, "273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri" 24 Februari 2022, <https://www.dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>, 1 maret 2022.

Faizi, Lutfan. Sejarah Formula E, Ajang Balap Mobil Listrik Pertama di Dunia!. 2022. <https://sports.sindonews.com/read/788713/49/sejarah-formula-e-ajang-balap-mobil-listrik-pertama-di-dunia-1654355191> diakses pada 29 September 2022.

Jakpro. Sejarah. <https://www.jakarta-propertindo.com/sejarah/> diakses pada 1 Oktober 2022.

Lani, Wijaya Diana. Jakpro Perkiraan Biaya Formula E Rp 1,23 Triliun, di luar Commitment Fee. 2021. <https://metro.tempo.co/read/1450529/jakpro-perkiraan-biaya-formula-e-rp-123-triliun-di-luar-commitment-fee> diakses tanggal 20 April 2022.

Lova, Cynthia. 2021. “Seluruh Anggota Fraksi PSI Resmi Ajukan Hak Interpelasi Formula E”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/18/12502011/seluruh-anggota-fraksi-psi-resmi-ajukan-hak-interpelasi-formula-e?page=all>, Diakses pada 11 Mei 2022.

Saputra, Eka Yudha. Melihat lagi 23 Janji Politik Anies Baswedan di Pilkada DKI 2017. 2022. <https://metro.tempco.co/read/1555043/melihat-lagi-23-janji-politik-anies-baswedan-di-pilkada-dki-2017> diakses pada 1 Oktober 2022.

Paat, Yustinus. Ini 3 Penyebab Utama Jakarta Sering Alami Banjir. <https://www.beritasatu.com/news/735757/ini-3-penyebab-utama-jakarta-sering-alami-banjir> diakses pada 2 Oktober 2022.

Puskapol.ui, Data DPRD Provinsi Terpilih 2019 – DKI Jakarta, <https://www.puskapol.ui.ac.id/data-dprd-provinsi-terpilih-2019-dki-jakarta> diakses pada 23 September 2022.

Representasi Politik dan Perilaku Legislatif (St Syarifatul Mar’ah). 2018. <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/07/representasi-politik-dan-perilaku-legislatif-st-syarifatul-marah/> diakses pada 17 Mei 2022.

Shaid, Lukman Deddy. 2021. “Gografis DKI Jakarta Tahun 2020”, <https://statistik.jakarta.go.id/geografis-dki-jakarta-tahun-2020/> diakses pada 28 September 2022

Wahyudi, Nyoman Ary. 2021. “PDIP: Formula E Berpotensi Boroskan Anggaran DKI Sebesar Rp.4,48 Triliun”, <https://jakarta.bisnis.com/read/20210831/77/1436185/pdip-formula-e-berpotensi-boroskan-anggaran-dki-rp448-triliun> diakses pada 11 Mei 2022

Lain-lain:

Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022. Jakarta. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Republik Indonesia. 2004, Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu 2004. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta. Presiden Republik Indonesia.

PEDOMAN WAWANCARA

(Interview Guide)

Narasumber: Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta

Pertanyaan:

1. Sebagai legislator, tentunya ada tanggung jawab dan kewajiban yang sangat besar dimana sebagai fraksi, harus bisa merepresentasikan partai. Sebagai anggota DPRD harus bisa merepresentasikan masyarakat, sebagai bagian dari komisi harus bisa merepresentasikan bidangnya. Dari ketiganya, menurut bapak manakah yang harus diprioritaskan?

2. Sebagai seorang wakil, bapak/ibu diberikan kewenangan atas regulasi di ranah DPRD DKI Jakarta ini. Namun semuanya tentu harus dibarengi dengan tanggung jawab kepada pihak yang bapak/ibu wakikan. Apakah menurut bapak/ibu pengusulan adanya interpelasi ini merupakan Tindakan yang tepat?

3. Jika ya, apa yang menjadi dorongan utama dengan adanya pengusulan interpelasi formula E ini?

4. Bagaimana dengan fungsi representasi yang ada di parlemen? Apakah ada dorongan dari masyarakat untuk mengangkat permasalahan Formula E atau berawal dari inisiatif sebagai wakil rakyat?

5. Jika ya, apa kepentingan dibalik adanya interpelasi ini?

6. Jika pengusulan interpelasi ini merupakan inisiatif, apakah dirasa sudah tepat sesuai dengan keinginan masyarakat yang diwakili?

7. Bagaimana proses persetujuan tentang adanya pengusulan tersebut di internal fraksi?

8. Apa urgensi bagi masyarakat dengan adanya usulan tersebut jika nantinya usulan tersebut terjadi?

9. Apakah ada peran lain seperti partai atau elit politik yang juga mendukung adanya pengusulan interpelasi tersebut?

10. Jika ya, mengapa?

11. Sejak mengawal permasalahan formula E ini, apa yang menjadi hamatan terbesar? (ancaman)
12. Akan sampai mana fraksi PDIP mengawal permasalahan Formula E? mengingat pelaksanaannya sudah terjadi dan masa jabatan dari gubernur Anies Baswedan akan berakhir sebentar lagi?
13. Jika sampai akhir masa jabatan Gubernur Anies Baswedan interpelasi tersebut masih tidak terlaksana, akan bagaimana?
14. Bagaimana dengan tanggung jawab kepada masyarakat yang diwakili?
15. Bagaimana kemudian hasil dari proses di dalam internal tersebut bisa di proses Kembali di kursi legislative?

PEDOMAN WAWANCARA

(Interview Guide)

Narasumber: Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta

Pertanyaan:

1. Sebagai legislator, tentunya ada tanggung jawab dan kewajiban yang sangat besar dimana sebagai fraksi, harus bisa merepresentasikan partai. Sebagai anggota DPRD harus bisa merepresentasikan masyarakat, sebagai bagian dari komisi harus bisa merepresentasikan bidangnya. Dari ketiganya, menurut bapak manakah yang harus diprioritaskan?

2. Sebagai seorang wakil, bapak/ibu diberikan kewenangan atas regulasi di ranah DPRD DKI Jakarta ini. Namun semuanya tentu harus dibarengi dengan tanggung jawab kepada pihak yang bapak/ibu wakikan. Apakah menurut bapak/ibu pengusulan adanya interpelasi ini merupakan Tindakan yang tepat?

3. Jika ya, apa yang menjadi dorongan utama dengan adanya pengusulan interpelasi formula E ini?

4. Bagaimana dengan fungsi representasi yang ada di parlemen? Apakah ada dorongan dari masyarakat untuk mengangkat permasalahan Formula E atau berawal dari inisiatif sebagai wakil rakyat?

5. Jika ya, apa kepentingan dibalik adanya interpelasi ini?

6. Jika pengusulan interpelasi ini merupakan inisiatif, apakah dirasa sudah tepat sesuai dengan keinginan masyarakat yang diwakili?

7. Bagaimana proses persetujuan tentang adanya pengusulan tersebut di internal fraksi?

8. Apa urgensi bagi masyarakat dengan adanya usulan tersebut jika nantinya usulan tersebut terjadi?

9. Apakah ada peran lain seperti partai atau elit politik yang juga mendukung adanya pengusulan interpelasi tersebut?

10. Jika ya, mengapa?

11. Sejak mengawal permasalahan formula E ini, apa yang menjadi hamatan terbesar? (ancaman)

12. Akan sampai mana fraksi PSI mengawal permasalahan Formula E? mengingat pelaksanaannya sudah terjadi dan masa jabatan dari gubernur Anies Baswedan akan berakhir sebentar lagi?

13. Jika sampai akhir masa jabatan Gubernur Anies Baswedan interpelasi tersebut masih tidak terlaksana, akan bagaimana?

14. Bagaimana dengan tanggung jawab kepada masyarakat yang diwakili?

15. Bagaimana kemudian hasil dari proses di dalam internal tersebut bisa di proses Kembali di kursi legislative?

16. Media masa menyoroti bahwa fraksi PDIP masih gencar menyuarakan tentang interpelasi formula E, namun sudah jarang terlihat fraksi PSI kurang menunjukkan eksistensinya. Apa yang terjadi? Apakah PSI ada rencana untuk berubah pikiran dan tidak lagi mengusulkan interpelasi tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

(Interview Guide)

Narasumber: BAPPEDA

Pertanyaan:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa fraksi PDIP dan PSI telah beberapa kali mengajukan interpelasi terkait formula E?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai hal tersebut?
3. Jika usulan interpelasi tersebut disetujui dan dapat berjalan, apakah bapak/ibu merasa keberatan dengan hal tersebut?
4. Dari berbagai alasan Fraksi PDIP dan PSI, hal utama yang ditekankan adalah mengenai transparansi dana Formula E yang bisa dibilang fantastis, apakah bapak/ibu merasa bahwa dana yang digunakan tersebut sesuai dengan kebutuhan realisasi Formula E dan tidak ada bukti adanya indikasi kecurangan didalamnya?

PEDOMAN WAWANCARA

(Interview Guide)

Narasumber: Kader PDIP/PSI

Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya pengusulan interpelasi Formula E saat ini?
2. Apakah rekan-rekan di partai turut mendukung adanya interpelasi tersebut?
3. Bagaimana kontribusi rekan-rekan terhadap interpelasi tersebut?
4. Menurut anda, apa prioritas DKI Jakarta saat ini?
5. Apakah yang dilakukan oleh rekan-rekan Fraksi sudah mewakili partai?
6. Apa harapan anda dengan adanya pengusulan hak interpelasi tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

(Interview Guide)

Narasumber: Ketua JAMAN

Pertanyaan:

1. Apakah bapak tau bahwa fraksi PDIP dan PSI mengusulkan adanya interpelasi terkait Formula E?
2. Bagaimana tanggapan bapak dengan hal tersebut?
3. Apakah yang dilakukan oleh rekan-rekan fraksi di kursi parlemen sudah mewakili bapak sebagai konstituen?
4. Apakah hadirnya Formula E ini sudah menjadi prioritas DKI Jakarta saat ini?
5. Jika tidak, menurut bapak apa yang harus diprioritaskan oleh Pemprov saat ini?
6. Bagaimana harapan bapak kepada rekan-rekan fraksi yang mengusulkan hal interpelasi?